



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANA SUPIANA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 433260

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.400 m²/150 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 60 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/60 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 362.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK SUPRA X 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI Z 250 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV 2.4 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000



5. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	901.870.652
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.313.870.652
III. HUTANG	Rp.	190.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.123.870.652

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.